PENGARUH KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAERAH DAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN TERHADAP AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP)

(Survei Pada SKPD Kabupaten Bandung Barat)

Muhamad Hasannudin - 21114219

Pembimbing:
Dr. Sri Dewi Anggadini, SE., M.Si., Ak., CA

Program Studi Akutansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Komputer Indonesia
Email: Hasannudinm06@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of Local Government Apparatus Competency and Financial Reporting System to Performance Accountability of West Bandung Regency Government Institution.

The purpose of this research is to identify the factors that influence the Improvement of Performance Accountability of Local Government Institution Through Local Government Apparatus Competence and Financial Reporting System at District Government Work Unit (SKPD) of West Bandung Regency Government.

The method used in this research is descriptive method and verifikatif quantitative approach. Unit of analysis in this research is accountancy and financial officer at 27 Unit of Local Device (SKPD) Regency of West Bandung and respondent 54 people. Data collection techniques used to collect data is by survey method using a questionnaire sent to the respondent. Statistical test used is the test of validity, reliability test and hypothesis test.

The result of the research shows that the Competence of Local Government Apparatus has an effect on the Accountability of Local Government Institution Performance with the influence of 23.19% and the Financial Reporting System influencing the performance of Local Government Institution with the influence of 22.22% at the SKPD Office of West Bandung Regency Government.

Keywords: Competence of Local Government Apparatus, Financial Reporting System, Performance Accountability of Local Government Institution.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kompetensi aparatur merujuk pada pendekatan perilaku, perilaku tertentu dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil, dan unggul/superior. Keterampilan perilaku terkait tugas, bisa dikuasai melalui pembelajaran dan bisa ditingkatkan melalui latihan dan bantuan orang lain. Perilaku merupakan fungsi dari faktor kepribadian individu dan faktor lingkungan, sikap dibentuk dari kombinasi pengalaman, kondisi sosial/lingkungan, dan kepribadian. Sikap ini ditunjukan dalam bentuk perilaku. Walaupun demikian, seseorang sangat mungkin untuk menutup sikap/bertindak bertentangan dengan sikap. Akan tetapi, umumnya sikap seseorang sesuai dengan perilakunya. masing-masing tingkatan, mengidentifikasi karakteristik, pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan individu yang memungkinkan menjalankan tugas dan tanggung jawab secara efektif (Sedarmayanti, 2017:238).

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi–transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.

Tujuan umum pelaporan keuangan adalah menyajikan sistem informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Secara spesifik, tujuan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya (Dedi Nordiawan dan Ayuningtyas 2011:205).

Akuntabilitas merupakan prinsip pertanggungjawaban publik yang berati bahwa proses penganggaran mulai dari perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dilaporkan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambilan keputusan berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Untuk ini, perumusan kebijakan, bersama-sama dengan cara dan hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal (Abdul Halim 2010:90).

Menurut Ani Ambarsari Selaku pegawai dibagian akuntansi dan sistem pelaporan keuangan (2018) yang menjadi masalah terkait kompetensi aparatur pemerintah daerah adalah masih sangat sedikit jumlah akuntan atau aparatur yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi baik berbasis sistem maupun manual, dikarenakan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang kurang memadai.

Menurut Ani Ambarsari Selaku pegawai dibagian akuntansi dan Sistem Pelaporan Keuangan (2018) yang menjadi masalah terkait Sistem Pelaporan Keuangan adalah masih terbatasnya pegawai yang berlatar belakang akuntansi dalam hal pencatatan laporan arus kas pada pendapatan masih secara semi manual terkadang masih ada kesalahan atau kekeliruan dalam hal pencatatannya. Jadi menyebabkan pelaporan keuanganya tidak andal dan menurunnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Menurut Adiyoto selaku Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Bandung Barat (2017) yang menjadi masalah terkait Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mendapat penilaian CC, Hal tersebut dinilai mengecewakan dalam penilaian lima komponen yang dievaluasi dari KBB terbilang masih rendah yakni Perencanaan kerja yang bobotnya 35, Pengukuran kerja, 20 bobot, Pelaporan kerja 15 bobot, Evaluasi kerja hanya 10 bobot dan Pencapaian kinerja hanya 20 bobot. Dengan demikian Kabupaten Bandung Barat hanya mampu mengumpulkan bobot nilai 50-65. selama ini paradigma birokrat dalam mengukur kinerja dilihat dari berapa besar kinerja yang telah dan akan dihabiskan. Seharusnya berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah"**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh Kompetensi Apratur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).
2. Seberapa besar pengaruh Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh kompetensi aparatur pemerintah dan sistem pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instasi pemerintah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui besarnya pengaruh kompetensi aparatur pemerintah Daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).
2. Untuk mengetahui besarnya pengaruh sistem pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP).

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis ini adalah sebagai bukti empiris atas Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), diharapkan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi khususnya ilmu akuntansi.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi peneliti, berguna untuk menambah dan memperluas wawasan ilmu pengetahuan peneliti tentang masalah yang diteliti, sehingga dapat diperoleh gambaran yang luas dan lebih jelas mengenai kesesuaian fakta lapangan dengan teori yang ada, memberikan penulis pengalaman yang sesungguhnya dalam dunia kerja, serta menyelesaikan pendidikan Strata 1 Program Studi Akuntansi
2. Bagi instansi yang bersangkutan, diharapkan dapat memberikan bahan masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan efektivitas kinerja pemerintah daerah agar tercipta pemerintahan yang lebih baik lagi.
3. Bagi pihak lain, selain sumber informasi dan bahan informasi yang dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan serta sebagai titik tolak bagi penelitian lebih lanjut yang lebih luas dan mendalam.

II. KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

2.1 Kajian Pustaka

2.1.1 Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

2.1.1.1 Pengertian Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

Menurut Sedarmayanti (2017:238), mendefinisikan kompetensi aparatur adalah sebagai berikut :

> "Kompetensi merujuk pada pendekatan perilaku, perilaku tertentu atau tipe dan tingkat perilaku yang berbeda yang dijadikan parameter untuk mampu melaksanakan pekerjaan secara efektif, berhasil dan unggul/superior".

Menurut Sedarmayanti (2017:236), komponen kompetensi adalah sebagai berikut :

1. Dorongan (*motives*)
2. Sifat *(traits*),
3. Citra Diri (*self concept*),
4. Pengetahuan (*knowledge*),
5. Keterampilan (*skill*),

2.1.1 Sistem Pelaporan Keuangan

Menurut Moh. Mahsun, Firma Sulistyowati, Heribertus Andre Purwanugraha (2016:31), mendefinisikan pelaporan keuangan adalah sebagai berikut :

> "Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan".

Menurut Moh. Mahsun, Firma Sulistyowati, Heribertus Andre Purwan ugraha (2016:32), indikaor pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

a. Akuntabiliatas
b. Manajemen
c. Transparasi
d. Keseimbangan Antargenerasi *(intergenerational equity)*

2.1.2 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Mardiasmo (2009:21), mendefinisikan Akuntabilitas adalah sebagai berikut :

> "Akuntabilitas (*accountability*) merupakan konsep yang lebih luas dari *slewardship. Slewardship* mengacu pada pengeloaan atas suatu aktivitas secara ekonomis dan efesien tanpa dibebani kewajiban untuk melaporkan, sedangkan *accountability* mengacu kepada pertanggungjawaban oleh seorang seorang steward kepada pemberi pertanggungjawaban ".

Menurut Mardiasmo (2009:21), dimensi akuntabilitas adalah sebagai berikut :

1. Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran (*accountability for probity and legality*)
2. Akuntabilitas Proses (*process accountability*)
3. Akuntabilitas Program (*program accountability*)
4. Akuntabilitas Kebijakan (*policy accountability*)

2.2 Kerangka Pemikiran

2.2.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Syarifudin dan Nogi dalam buku zuchri (2014:2), menyatakan kompetensi aparatur adalah sebagai berikut :

> "Faktor kemampuan organisasi (lembaga) merupakan factor kunci dalam menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Kemampuan kinerja organisasi tidak bisa terlepas dari kemampuan aparat karena dengan melalui aparat yang berkualitas, maka kinerja suatu organisasi bisa tercapai".

2.2.2 Pengaruh Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Menurut Mursyidi (2009:2) menyatakan bahwa pelaporan keuangan adalah sebagai berikut:

> "Untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya dengan menyediakan informasi posisi atau perubahan posisi sumber daya ekonomi dan ekuitas dana pemerintah, menyediakan informasi mengenai sumber alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi".

Berdasarkan premis-premis diatas, maka penullis menarik hipotesis sebagai berikut:

H_1 : Kompetensi aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabiliatas kinerja Instansi Pemerintah

H_2 : Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabiliatas kinerja Instansi Pemerintah

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dan verifikatif, yaitu cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah (Sugiyono, 2012:23),

3.2 Operasionalisasi Variable

Operasionalisasi variabel menurut Sugiyono (2012:58), Suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya".

3.3 Sumber dan Teknik Pengumpulam Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data Primer. Menurut, sumber primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul (Sugiyono, 2015:137)

3.3.2 Teknik Pengumpulam Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang adalah kuesioner tertutup yang berisi daftar pertanyaan yang telah diberi skor, dimana data tersebut nantinya akan dihitung menggunakan statistik.

3.4 Populasi, Sampel, Tempat dan Waktu Peneltian

3.4.1 Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah 27 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas/Badan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

3.4.2 Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah 54 responden Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas/Badan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

3.4.3 Tempat dan Waktu Peneltian

Untuk memperoleh data dan informasi yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, maka penulis mengadakan penelitian yang dilakukan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Jl. Ciloa, Mekarsari, Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat 4055. Adapun waktu pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Maret 2018 sampai dengan Agustus 2018.

3.5 Metode Pengujian Data

3.5.1 Uji Validitas

Uji validitas menurut Sugiyono (2012:121), Hasil penelitian yang valid bila terdapat kesamaan anatara data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.

3.5.2 Uji Reabilitas

Uji reliabilitas menurut Umi Narimawati (2010:43), untuk menguji keandalan kuesioner yang digunakan lebih dari satu kali, dengan responden yang sama. Metode yang digunakan adalah *split half method (spearman-brown correlation)*.

3.6 Metode Analisis Data

3.6.2 Analisis Deskriptif

Penelitian deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sehingga diperoleh kesimpulan.

3.6.2 Analisis Verifikatif

Dalam penelitian ini dengan menggunakan alat uji statistik yaitu dengan uji persamaan strukturan berbasis variance atau yang lebih dikenal dengan nama *Partial Least Square (PLS)* menggunakan software *Smart* PLS. Pengertian metode *Partial Least Square (PLS) menerut* Imam Ghozali (2013:18), Model persamaan strukturan berbasis variance (PLS) mampu menggambarkan variabel laten (tak terukur langsung) dan diukur menggunakan indikator-indikator (variable manifest).

3.6.3 Hipotesis

Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Terdapat dua hipotesis dalam penelitian ini, keduanya diuji dengan ketentuan Ho ditolak jika $t_{statistik}$ lebih besar dari t_{kritis} untuk $\alpha = 0,05$ sebesar 1,645.

1) Hipotesis pertama adalah Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
2) Hipotesis kedua adalah Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Hasil Analisis Deskriptif

1. Tingkat Pengembalian Kuesioner (*Respone Rate*)

Tingkat pengembalian kuesioner pada penelitian ini sebesar 100%, yang dihitung dari persentase jumlah kuesioner yang kembali dibagi dengan jumlah kuesioner yang disebar. Tingkat pengembalian kuesioner dapat diterima dan hasil jawaban kuesioner dapat diolah karena *respon rate* lebih besar dari kriteria *acceptable*.

2. Profil Responden

Hasil dari kuesioner diketahui bahwa mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki, selanjutnya berdasarkan tingkat pendidikan terakhir mayoritas responden adalah S1 dan mayoritas berdasarkan usia berada pada 36–45 tahun.

3. Pengujian Alat Analisis

a. Validitas

Suatu alat ukur dinyatakan valid atau sah apabila memiliki nilai koefisien validitas lebih

dari 0,30. Hasil uji vailiditas disajikan pada tabel 4.5.

b. Reliabilitas

Suatu alat ukur dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai koefisien reliabilitas lebih dari 0,70. Hasil uji reliabilitas disajikan pada tabel 4.6.

4. Hasil Analisis Deskriptif

a. Analisis Deskriptif Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah

Hasil perhitungan persentase tanggapan responden mengenai Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berada pada interval 68% - 84% dengan nilai sebesar 76,81% mendapat kategori cukup baik, dan masih terdapat *gap* sebesar 23,19%.

b. Analisis Deskriptif Sistem Pelaporan Keuangan

Hasil perhitungan persentase tanggapan responden mengenai Sistem Pelaporan Keuangan berada pada interval 68% - 84% dengan nilai sebesar 77,23%, mendapat kategori cukup baik, dan masih terdapat *gap* sebesar 22,87% .

c. Analisis Deskriptif Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil perhitungan persentase tanggapan responden mengenai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berada pada interval 68% - 84% dengan nilai sebesar 77,78 mendapat kategori cukup baik, dan masih terdapat *gap* sebesar 22,22%.

5. Hasil Analisis Verifikatif

1. Pengujian Model Pengukuran (*Outer Model*)

A. Uji Validitas

a) Convergent Validity

Convergent validity berhubungan dengan prinsip bahwa indikator suatu konstruk harus berkorelasi tinggi yang dilihat dari nilai outer loading untuk tiap variabel indikator konstruk, adapun nilai *outer loding* harus lebih dari 0,5-0,6 dikategorikan cukup sedangkan lebih dari 0,7 dikategorikan tinggi. Maka nilai *average variance extrated* dan *communality* harus lebih dari 0,5. Hasil uji *convergent validity* dapat dilihat pada tabel 4.23.

b) Discriminant Validity

Discriminant validity dilihat dari *cross loading factor* dan membandingkan akar AVE dengan korelasi antar variabel. Hasil nilai *cross loading factor* dapat dilihat pada tabel 4.24.

B. Reliabilitas

Uji reliabilitas dalam *Partial Least Square* (PLS) dapat menggunakan *composite reliability* (CR). Hasil dari uji reliabilitas disajikan pada tabel 4.27.

C. *Evaluasi Fit Test Of Combination Model* (Seluruh Model)

Uji kecocokan seluruh model gabuangan adalah uji kecocokan untuk memvalidasi model keseluruhan, menggunakan nilai

Goodness of Fit (GoF). Hasil Gof dapat dilihat pada tabel 4.28.

2. Pengujian Model Struktural (*Inner Model*)

Hipotesis dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan nila koefisien *path* dan *t-values*. Hasil *path coeficients* dapat dilihat pada tabel 4.29.

3. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipoetsis digunakan untuk melihat apakah pengaruh yang diberikan oleh kedua variabel laten eksogen tersebut signifikan atau tidak. Taraf signifikan yang diberikan adalah α = 0,05 sebesar 1,674. Hasil uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 4.31 dan 4.32.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa t_{hitung} untuk kompetensi aparatur pemerintah daerah (X_1) sebesar 2,183 dengan nilai t_{tabel} sebesar 1,674. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (2,183>1,674) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya berpengaruh. Terdapat hubungan positif yang rendah/lemah antara kompetensi aparatur pemerintah daerah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana semakin baik kompetensi aparatur pemerintah daerah maka akan diikuti semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasil penelitian melalui koefisien determinasi diketahui bahwa kompetensi aparatur pemerintah daerah berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu sebesar 11,81% dan sisanya sebesar 82,19% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, yaitu sistem akuntansi keuangan daerah, kejelasan sasaran anggaran dan faktor-faktor lainya yang memberikan pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Hal tersebut juga mendukung penelitian terdahulu yaitu penelitian Riska Fahrul Razi (2017), Muhammad Hafiz (2017), Zirman, Edfan Darlis, dan R. Muhammad Rozi (2010), Egrinaen Mauliziska Nugraheni Putri (2015), dan Winda Amelia (2017) hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Pelaksanaa Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4.2.2 Pengaruh Sistem Pelaporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Hasil pengujian hipotesis dapat dilihat bahwa t_{hitung} untuk sistem pelaporan keuangan (X_2) sebesar 5,333 dengan nilai ttabel sebesar 1,674. Dikarenakan nilai t_{hitung} lebih besar dari nilai t_{tabel} (5,333>1,674) maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya berpengaruh. Terdapat hubungan positif yang sedang/moderat antara sistem pelaporan keuangan terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, dimana semakin baik sistem pelaporan keuangan maka akan diikuti semakin baik pula akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Hasi penelitian melalui koefisien determinasi diketahui bahwa sistem pelaporan keuangan berpengaruh terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yaitu sebesar 32,99% dan sisanya sebesar 67,01% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini, yaitu pengendalian intern, anggaran berbasis kinerja, good governance, pengendalian akuntansi, dan faktor-faktor lainya yang memberikan pengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) .

Hal tersebut juga mendukung penelitian terdahulu yaitu M. Ali Zakiyudin dan Suyanto (2015), Ni Made Mega Cahyani dan I Made Karya Utama (2015), Mei Anjarwati (2012), dan Netty Herawaty (2011), hasil penelitiannya mengemukakan bahwa Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat - Provinsi Jawa Barat maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana semakin baik Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah maka akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan begitu pun jika sebaliknya. terkait mengenai Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah adalah masih sangat sedikit jumlah Akuntan atau Aparatur yang tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi baik berbasis sistem maupun manual, dikarenakan tidak memiliki latar belakang pendidikan akuntansi yang kurang memadai.
2. Sistem Pelaporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana jika semakin baik Sistem Pelaporan Keuangan, maka akan meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan begitu pun jika sebaliknya. terkait dengan Sistem Pelaporan yaitu masih terbatasnya pegawai yang berlatar belakang akuntansi dalam hal pencatatan laporan arus kas pada pendapatan masih secara semi manual terkadang masih ada kesalahan atau kekeliruan dalam hal pencatatannya. Jadi menyebabkan pelaporan keuanganya tidak andal dan menurunnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

5.2 Saran

5.2.1 Saran Praktis :

Setelah penulis memberikan kesimpulan dari hasil penelitian tentang pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah dan Sistem Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka penulis akan memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1) Pada Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah maka yang harus diberikan fokus perhatian adalah pada indikator Pengetahuan dimana Pemerintah Daerah harus lebih memperketat proses seleksi Aparatur Pemerintah Daerah supaya Aparatur yang bekerja di Pemerintah Daerah memiliki kualifikasi dan kompetensi yang sesuai di bidangnya, pengetahuan yg dimiliki Aparatur pun dapat memenuhi kebutuhan setiap pekerjaan di pemerintah daerah, sehingga Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah dapat meningkat.
2) Pada Sistem Pelaporan Keuangan maka yang harus diberikan fokus perhatian adalah pada indikator Akuntabilitas Program dimana Pemerintah Daerah perlu membuat sistem informasi keuangan yang mampu memberikan informasi keuangan secara tepat dan akurat. Pemerintah Daerah juga perlu meningkatkan pengendalian terkait pencatatan laporan keuangan untuk menjaga kualitas keandalan laporan keuangan. Adanya sistem informasi keuangan dan peningkatan pengendalian dapat meminimalisir kesalahan yang dilakukan ketika mencatat laporan keuangan secara manual, dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah pun dapat meningkat.

5.2.2 Saran Akademis :

Dalam pengembangan ilmu akuntansi khususnya akuntansi sektor publik diharapkan hasil ini dapat dijadikan acuan agar kedepannya peneliti lain dapat menggunakan variabel yang sama, metode

yang sama tetapi unit analisis, populasi dan sampel yang berbeda atau mencari variabel lain yang mempengaruhi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

VI DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku:

Abdul Halim. 2010 . Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat.

Deddi Nordiawan. 2011. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit Salemba Empat. Jakarta

Imam Ghozali.2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 21 Update PLS Regresi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Yogyakarta: Andi.

Moh Mahsun, Firma sulistyowati, dan Heribertus Andre Purwanugraha. 2016. Akuntansi Sektor Publik. Penerbit BPFE. Yogyakarta.

Mursidi. 2009. Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. Penerbit Refika Aditama. Bandung.

Sedarmayanti. 2017. Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Untuk Meningkatkan Kompetensi, Kinrerja, dan Produktifitas Kinerja. Penerbit Refika Aditama. Bandung.

Sugiyono.2011. Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan

R&D. Cetakan ke 7. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Memahami Penelitian Kualitatif". Bandung : ALFABETA.

Sugiyono. 2014. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2015. Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D). Bandung: Alfabeta.

Suharsimi Arikunto. 2013. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta.

Zuchri Abdussamad. 2014. Kompetensi Aparat dalam Pelayanan Publik. Edisi 1.Yogyakarta

Sumber Jurnal :

Muhamad Hafiz. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah, Ketaatan Pada Peraturan Perundangan Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas KInerja Instansi PEmerintah Dengan Komitmen Organisasi Dan Kinerja Manajerial Sebagai Variable Moderatin.Fekon, Vol. 4 No. 1 [ISSN : 2355-6854] *Faculty of Economics* Riau University, Pekanbaru.

Riska Fahrul Razi. 2017. Pengaruh Ketaan Terhadap Peraturan Perundangan, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pengendalian Akuntansi Dan Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu). JOM Fekon Vol. 4 No. 1 [ISSN: 2355-6854] *Faculty of Economic* Riau University, Pekanbaru.

Egrinaen Mauliziska Nugraheni, Amries Rusli Tanjung, Susilatri. 2015. Pengaruh Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah, Penerapan Akuntabilitas Keuangan, Pemanfaatan Teknologi informasi dan Ketaatan pada Peraturan Perundangan terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.Vol 2 No.1 2105 [ISSN:

2355-6854] *Faculty of Economic* Riau University, Pekanbaru.

Sumber Internet:
https://finance.detik.com/wawancara-khusus/d-3521215/laporankeuanganpemda-selalu-wtp-menpan-rb-hasilnya-apa
http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/04/bpk-temukan-1137-ketidakpatuhan-dalam-laporan-keuangan-pemerintah

Loading Factor

Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah		Loading Faktor	t_{hitung}	Keterangan
$X_{1.1}$	Dorongan	0,601	2,608	Valid
$X_{1.2}$	Sifat	0,824	8,929	Valid
$X_{1.3}$	Citra Diri	0,834	10,224	Valid
$X_{1.4}$	Pengetahuan	0,722	6,093	Valid
$X_{1.5}$	Keterampilan	0,825	14,219	Valid

Sistem Pelaporan Keuangan		Loading Faktor	t_{hitung}	Keterangan
$X_{2.1}$	Akuntabilitas	0,658	6,554	Valid
$X_{2.2}$	Manajemen	0,710	9,001	Valid
$X_{2.2}$	Transparansi	0,820	13,252	Valid
$X_{2.2}$	Keseimbangan Antargenerasi	0,858	28,231	Valid

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah		Loading Faktor	t_{hitung}	Keterangan
$Y_{.1}$	Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran	0,727	9,666	Valid
$Y_{.2}$	Akuntabilitas Proses	0,875	19,877	Valid
$Y_{.3}$	Akuntabilitas Program	0,733	8,821	Valid
$Y_{.4}$	Akuntabilitas Kebijakan	0,838	18,302	Valid

AVE

Variabel Laten	AVE	Communality
X_1. Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah	0,588	0,588
X_2. Sistem Pelaporan Keuangan	0,586	0,586
Y. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,633	0,633

Cross Loading Factor

	Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah	Sistem Pelaporan Keuangan	Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

$X_{1.1}$	0,601	0,151	0,058
$X_{1.2}$	0,824	0,434	0,282
$X_{1.3}$	0,834	0,393	0,251
$X_{1.4}$	0,722	0,177	0,289
$X_{1.5}$	0,825	0,502	0,423
$X_{2.1}$	0,273	0,658	0,478
$X_{2.2}$	0,329	0,710	0,472
$X_{2.2}$	0,346	0,820	0,476
$X_{2.2}$	0,486	0,858	0,590
$Y_{.1}$	0,287	0,505	0,727
$Y_{.2}$	0,374	0,540	0,875
$Y_{.3}$	0,225	0,521	0,733
$Y_{.4}$	0,711	0,543	0,838

Perbadingan Akar AVE dengan Korelasi Variabel Laten

Variabel Laten	AKAR AVE
X_1	0,766
X_2	0,765
Y	0,795

	Korelasi Antar Variabel Laten		
	X_1	X_2	Y
X_1	1,000		
X_2	0,477	1,000	
Y	0,395	0,464	1,000

Composite Reliability

Variabel Laten	Composite Reliability
X_1. Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah	0,875
X_2. Sistem Pelaporan Keuangan	0,849
Y. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,873

Hasil Nilai GoF

Variabel Y	0,633	0,448
Perkalian	0,2835	
Nilai GoF	0,5325	

Nilai Koefisien Jalur Struktural dan Uji Signifikansi Hipotesis

(*Path Coefficients*)

	Original Sample (O)	T *Statistics* (|O/STERR|)
X_1. Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah -> Y. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,301	2,183
X_2. Sistem Pelaporan Keuangan -> Y. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	0,711	5,533

Analisis Koefisien Determinasi (R^2)

	Koefisien Jalur Struktural	Korelasi dengan Y	Pengaruh (%)
Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah (X_1) -> Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0,301	0,395	11,81%
Sistem Pelaporan Keuangan (X_2) -> Y Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)	0,711	0,464	32,99%
TOTAL PENGARUH (R^2)			44,8%

Uji t Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah (X_1) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Latent Variable	Koefisien Jalur	$t_{statistik}$	t_{kritis}	Keterangan	Kesimpulan
X1 -> Y	0,301	2,183	1,674	Ho ditolak	Berpengaruh

Uji *t* Sistem Pelaporan Keuangan (X_2) Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Y)

Latent Variable	Koefisien Jalur	$t_{statistik}$	t_{kritis}	Keterangan	Kesimpulan
X2 -> Y	0,711	5,533	1,674	Ho ditolak	Berpengaruh